

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi paradigma utama dalam upaya pembangunan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sebagai respons terhadap berbagai persoalan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang semakin kompleks. Perubahan iklim, degradasi lingkungan, penurunan kualitas sumber daya alam, serta ketimpangan ekonomi menjadi tantangan utama yang membutuhkan solusi inovatif dan terintegrasi (World Bank, 2019). Dalam konteks tersebut, konsep *green economy* muncul sebagai alternatif strategis yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemerataan sosial. *green economy* bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat secara luas (Fitriani & Nurhadi, 2021).

Dalam rangka mewujudkan konsep ini, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Kebijakan ini mengarahkan pemanfaatan dana desa untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa secara menyeluruh. Dana desa diarahkan agar digunakan tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk program yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Dengan kebijakan ini, diharapkan desa dapat bertransformasi menjadi pusat ekonomi hijau yang mampu menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi konsep *green economy* dalam kebijakan pembangunan nasional, salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana desa sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Dana desa yang dialokasikan sejak 2015 menunjukkan peningkatan signifikan, dengan tujuan utama mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Kementerian Keuangan RI, 2024; BPS, 2023). Namun, alokasi dana desa yang signifikan tersebut belum sepenuhnya disertai dengan penerapan prinsip-prinsip *green economy* dalam pelaksanaan program di tingkat desa.

Salah satu potensi strategis di desa adalah pengembangan ekowisata, yang menggabungkan aspek pelestarian lingkungan dan budaya lokal dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Ekowisata berperan sebagai sektor yang tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya alam dan meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat (Sari & Prasetyo, 2023). Kampung Wisata Damaran Baru di Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu desa yang menunjukkan kemajuan dalam pengembangan ekowisata berbasis *green economy*. Desa ini berhasil meraih penghargaan sebagai Desa Wisata Simbol Kebangkitan Ekonomi Nasional, yang menjadi bukti keberhasilan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sari & Prasetyo, 2023; Fitriani & Nurhadi, 2021).

Sejak 2015, dana desa terus meningkat dan penggunaannya meluas dari infrastruktur ke sektor produktif ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, wisata alam, pengelolaan sampah, dan ketahanan pangan. Namun, implementasi kebijakan *green economy* belum optimal. Alokasi masih didominasi pembangunan fisik, pelatihan teknis aparatur minim, partisipasi masyarakat rendah, serta tata kelola belum transparan dan akuntabel. Berikut data pemanfaatan dana desa tiga tahun terakhir dan proyeksinya:

Table 1.1
Pemanfaatan Dana Desa Selama Tiga Tahun Terakhir Dan Proyeksi Ke Depan

Tahun	Total Dana Desa (Rp Triliun)	Fokus Penggunaan Utama	Persentase untuk Infrastruktur Fisik	Jumlah Desa Mandiri (Jumlah Desa)	Penduduk Miskin di Desa (Juta Jiwa)
2022	68,0	Infrastruktur, Wisata, Ketahanan Pangan, Energi Terbarukan	30-35%	20.249 dari 74.961	15,26
2023	70,0	Infrastruktur, Pengembangan Desa Wisata, Energi Terbarukan, Pengelolaan Sampah	28-33%	21.000 (perkiraan)	14,90 (perkiraan)
2024	72,0	Infrastruktur, Wisata Berbasis Lingkungan, Ketahanan Pangan, Energi Terbarukan	25-30%	22.000 (perkiraan)	14,50 (perkiraan)

Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2024; BPS, 2023).

Salah satu sektor potensial dalam penerapan *green economy* di tingkat desa adalah pengembangan ekowisata. Ekowisata dianggap sebagai strategi pembangunan yang mengintegrasikan pelestarian lingkungan, pelestarian budaya lokal, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Sari & Prasetyo, 2023). Dalam konteks ini, Kampung Wisata Damaran Baru di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, menjadi salah satu contoh yang menonjol. Desa ini menunjukkan inisiatif pengembangan wisata berbasis lingkungan hidup dan budaya lokal dengan mengandalkan sebagian dana desa. Bahkan, Damaran Baru telah mendapatkan penghargaan sebagai Desa Wisata Simbol Kebangkitan Ekonomi Nasional (Sari & Prasetyo, 2023; Fitriani & Nurhadi, 2021).

Berdasarkan hasil observasi awal, diketahui bahwa pengelolaan Kampung Wisata Damaran Baru telah memanfaatkan dana desa dalam pengembangan *Eco Village*. Berikut adalah data penggunaan dana desa untuk keperluan tersebut selama dua tahun terakhir:

Table. 1.2
Jumlah Dana Desa di Kampung Damaran Baru

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Dana Desa	Persentase Penggunaan Dana Desa
1.	2024	Rp 658.965.000,-	3%
2.	2025	Rp 669.797.000,-	3%

Sumber: Bapak Reje

Berdasarkan Tabel 1.2, dalam dua tahun terakhir Dana Desa telah dialokasikan sebesar 3% untuk pengelolaan dan pengembangan Kampung Wisata Damaran Baru. Dana tersebut digunakan untuk mendukung wisata hutan lindung, *camping ground*, air terjun, serta berbagai bentuk wisata edukasi seperti panen madu Damaran, panen kopi, panen selada air, edukasi *Furniture Grupel*, budidaya stroberi, serta pembuatan tempe dan tahu. Kampung ini juga menyediakan *homestay* dan menghasilkan produk khas Gayo seperti madu, kopi hitam, lepat gayo, jenang, pengat, dan cecah gayo.

Namun demikian, meskipun pemanfaatan dana desa telah diarahkan untuk mendukung program berbasis *green economy*, pengelolaan Kampung Wisata Damaran Baru menghadapi berbagai dinamika dan tantangan yang penting untuk ditelaah lebih lanjut. Salah satu aspek krusial adalah pengelolaan dana desa yang perlu ditinjau dari sisi transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan wisata berbasis lingkungan. Informasi yang terbatas dan belum terstruktur secara digital juga menyulitkan masyarakat untuk mengakses perkembangan penggunaan dana secara utuh.

Selain itu, kapasitas sumber daya manusia lokal dalam merancang dan melaksanakan program ekonomi hijau masih menjadi perhatian. Aparatur kampung dan pengelola wisata belum seluruhnya memahami prinsip-prinsip *green economy* secara mendalam, seperti pengelolaan wisata berbasis konservasi, efisiensi energi, dan integrasi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program wisata yang bersifat edukatif dan berkelanjutan.

Aspek koordinasi lintas sektor juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Koordinasi antara Pemerintah Kampung Damaran Baru dengan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah serta dinas terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa masih perlu ditingkatkan, agar program wisata yang dikembangkan sejalan dengan rencana pembangunan daerah dan standar lingkungan yang berlaku.

Dari sisi masyarakat, tingkat pelibatan warga dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan wisata perlu diperkuat. Masyarakat merupakan pemangku kepentingan utama dalam keberlanjutan ekowisata, namun dalam praktiknya masih banyak warga yang hanya terlibat pada tahap pelaksanaan kegiatan. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pembentukan kelembagaan yang partisipatif dapat menjadi kunci untuk memperkuat rasa kepemilikan terhadap program-program wisata desa.

Selanjutnya, ketersediaan infrastruktur pendukung juga memengaruhi kualitas pengalaman wisata dan efektivitas program. Beberapa titik lokasi wisata seperti hutan lindung, air terjun, dan lokasi edukasi madu dan kopi masih memerlukan peningkatan aksesibilitas, fasilitas kebersihan, papan informasi, serta sistem promosi digital yang lebih strategis untuk menjangkau wisatawan secara luas.

Melihat berbagai dinamika tersebut, penting untuk menelaah lebih jauh bagaimana implementasi kebijakan *green economy* melalui pemanfaatan dana desa benar-benar dijalankan di tingkat lokal, dalam hal ini di Kampung Wisata Damaran Baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut telah diadopsi dan diterjemahkan dalam praktik pengelolaan desa wisata, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang yang ada dalam proses tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, pemilihan permasalahan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya menelaah bagaimana kebijakan nasional tentang green economy benar-benar diimplementasikan secara konkret di tingkat desa, khususnya melalui pemanfaatan dana desa dalam pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Meskipun Kampung Wisata Damaran Baru menunjukkan potensi dan inisiatif dalam pengembangan wisata berbasis lingkungan, berbagai tantangan masih dihadapi dalam hal tata kelola dana desa, kapasitas sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, dan keterlibatan masyarakat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan green economy dalam pemanfaatan dana desa dilakukan di Kampung Wisata Damaran Baru dan sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edward III. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses implementasi serta faktor menghambat kebijakan green economy di tingkat desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1 Bagaimana implementasi kebijakan *Green economy* dalam pemanfaatan dana desa untuk pengembangan ekowisata di Kampung Wisata Damaran Baru, Kabupaten Bener Meriah?
- 2 Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pemanfaatan dana desa untuk mendukung pengembangan ekowisata berbasis *Green economy* di Kampung Wisata Damaran Baru?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

- 1 Implementasi kebijakan *Green economy* dalam pemanfaatan dana desa untuk pengembangan ekowisata di Kampung Wisata Damaran Baru, Kabupaten Bener Meriah.
- 2 Hambatan yang dihadapi dalam pemanfaatan dana desa untuk mendukung pengembangan ekowisata berbasis *Green economy* di Kampung Wisata Damaran Baru.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Implementasi kebijakan *Green economy* dalam pemanfaatan dana desa untuk pengembangan ekowisata di Kampung Wisata Damaran Baru, Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pemanfaatan dana desa untuk mendukung pengembangan ekowisata berbasis *Green economy* di Kampung Wisata Damaran Baru.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan masukan bagi para akademisi dan mahasiswa yang tertarik melakukan penelitian lanjutan terkait implementasi kebijakan *Green economy*, pemanfaatan dana desa, dan pengembangan ekowisata berbasis keberlanjutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu kebijakan publik, khususnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait dalam rangka

meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan *Green economy* melalui pemanfaatan dana desa. Secara khusus, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi hambatan dan peluang pengembangan ekowisata yang berkelanjutan di Kampung Wisata Damaran Baru sehingga menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan dan strategi pembangunan desa yang ramah lingkungan dan memberdayakan masyarakat.